

**TUGAS KELOMPOK**  
**MENGURAIKAN BEBERAPA MODEL/PENDEKATAN KEBIJAKAN**  
**PUBLIK DAN MEMBANDINGKAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS**  
**KEBJAKAN PUBLIK**

**Dosen Pengampu: Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**



**Disusun oleh:**

**KELOMPOK 6 REGULER D**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>M. AFDZAL SYAPUTRA</b> | <b>2316041115</b> |
| <b>DESTA AULIA PUTRI</b>  | <b>2316041116</b> |
| <b>DESI LESTARI</b>       | <b>2316041122</b> |
| <b>IIS MUTIARA</b>        | <b>2316041129</b> |
| <b>DOVAZ MAY ROZA</b>     | <b>2316041131</b> |
| <b>NIKOLAS SIMBOLON</b>   | <b>2316041139</b> |

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

## **A. Uraian Materi**

### **1. Beberapa Model/Pendekatan Kebijakan Publik**

#### **1.1. Model Rasional**

Model rasional menggambarkan cara terbaik untuk mencapai tujuan kebijakan melalui proses pembuatan keputusan. Teori rasionalis berakar pada positifisme dan rasionalisme. Bermula dari gagasan bahwa kita harus mengembangkan pengetahuan secara objektif (tidak memihak) untuk memperbaiki keadaan manusia.

#### **1.2. Model Incremental**

Menurut model incremental, pembuatan keputusan kebijakan publik adalah proses politik yang ditandai dengan perundingan dan kesepakatan demi kepentingan pembuat keputusan sendiri. Menurut Lindblom, para pembuat keputusan membuat kebijakan melalui “membandingkan keberhasilan secara terbatas dari keputusan yang lalu”. Model incremental berpendapat bahwa pemecahan masalah untuk mencapai tujuan dipilih melalui trial and error daripada evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang akan dipatuhi kelompok sasaran dan berhenti mencari alternatif lain ketika mereka yakin alternatif yang dapat diterima sudah di dapatkan.

#### **1.3. Model Mixed-Scanning**

Untuk mengatasi kelemahan model incremental dan rasional, Amitai Etzioni mengembangkan model campuran yang menggabungkan elemen dari kedua model tersebut. Etzioni menunjukkan bahwa dia membuat dua jenis keputusan penggabungan antara model rasional dan incremental. Jenis pertama adalah keputusan fundamental atau kontekstual, yang terdiri dari pilihan menyeluruh terhadap pilihan utama yang dipilih oleh pembuat kebijakan publik untuk mencapai tujuan. Jenis kedua adalah keputusan incremental atau bit decisions, yang terdiri dari keputusan yang dibuat secara incremental atau dengan perubahan sekecil mungkin yang telah dibuat sebelumnya.

#### **1.4. Model Garbage Can**

Model Garbage Can, atau model tong sampah, adalah model kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa mendesak. Dalam ilmu sosial, model Garbage Can mengkritik model pengambilan keputusan rasional dengan menggambarkan organisasi sebagai kumpulan arena keputusan semi-otonom. Model ini menggambarkan masalah, solusi, dan peserta/pengambil keputusan sebagai tiga “aliran” independen yang masing-masing dibuat secara terpisah. Ketiga aliran ini hanya bergabung saat aliran-aliran tersebut masuk ke dalam “tong sampah” secara bersamaan, di mana proses pengambilan keputusan akhirnya dapat terjadi.

#### 1.5. Model Institusional

Model institusional dalam kebijakan publik adalah model yang menitik beratkan pembuatan kebijakan kepada institusi, peran institusi dalam pendekatan ini sebagai pembentukan, implementasi dan juga mengevaluasi kebijakan publik yang dilaksanakan. Institusi yang dimaksud mencakup berbagai organisasi, struktur pemerintahan, aturan, dan norma yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dibuat dan dijalankan. Menurut Thomas R. Dye dalam Suwitri (2008) alasan adanya hubungan yang kuat antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, karena lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mempunyai tiga (3) kewenangan yang tidak dimiliki lembaga-lembaga lain di luar lembaga pemerintahan, yaitu:

Lembaga pemerintah berwenang memberikan pengesahan (legitimasi) Terhadap kebijakan publik, ini berarti kebijakan publik merupakan kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga negara.

Lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik, artinya kebijakan publik dapat disebarluaskan dan berlaku pada seluruh warga negara atau kelompok sasaran kebijakan publik tersebut.

Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan publik pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak menaatinya.

### 1.6. Model Elit-Massa

Model pendekatan Elit-Massa dapat dikatakan model kelas, karena terdapat kelas Elit dan juga kelas Massa. Elit adalah kelompok kecil yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dan massa kelompok besar yang menjadi sasaran kebijakan. Kepentingan Elit tidak selalu mengedepankan kepentingan massa, bisa dikatakan bisa saja kepentingan tersebut dibuat hanya untuk beberapa orang atau kelompok. Sedangkan model Massa menekankan partisipasi masyarakat secara langsung.

### 1.7. Model Pendekatan Kelompok

Model pendekatan kelompok adalah bentuk pendekatan kebijakan yang melihat atau yang didasarkan pada hasil kompetisi dan negosiasi antara kelompok kepentingan yang pada dasarnya memiliki pengaruh terhadap pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut menjalani negosiasi dan akhirnya mendapatkan keputusan pembuatan kebijakan.

### 1.8. Model Pendekatan Sistem Politik

Pendekatan sistem politik dalam kebijakan publik mengacu pada hasil dari interaksi berbagai komponen dalam sistem politik, termasuk pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingan. Pendekatan ini memandang kebijakan publik sebagai output dari proses politik yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga. Dalam sebuah kebijakan harus terdapat input dan output contohnya masyarakat memberikan argumentasi dan pendapat maka pemerintah memberikan output yaitu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan argumentasi masyarakat.

## **2. Perbandingan Pendekatan Publik dalam Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik melibatkan berbagai model pendekatan yang masing-masing memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda. Pemilihan model yang tepat akan sangat bergantung pada konteks permasalahan, tujuan analisis, serta data yang tersedia.

### 2.1. Model Rasional

Model ini didasarkan atas teori ekonomi atau konsep manusia ekonomi (concept of an economic man). Model rasional menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensifitas informasi dan keahlian pembuatan keputusan. Teori-teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positifisme, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara obyektif (tidak memihak) suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara yang „ilmiah“ atau „rasional“, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik. Kritik terhadap model rasional ini datang dari ilmuwan Herbert Simon, pada awal 1950-an, ia mengkritik model rasional dengan menunjukkan bahwa keputusan publik tidak selalu memaksimalkan keuntungan tetapi sering hanya berusaha memenuhi kepuasan pembuat keputusan. Simon mengidentifikasi tiga keterbatasan manusia yang menghambat rasionalitas komprehensif yaitu : 1. memiliki keterbatasan intelektual, 2. mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga, 3. mempunyai keterbatasan informasi.

## 2.2. Model Inkrementalis

Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya memodifikasi sedikit. Model inkremental adalah merupakan kritik dan perbaikan terhadap model rasional. Model inkremental dalam pembuatan keputusan mengutamakan pendekatan trial and error dibandingkan evaluasi menyeluruh. Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang sesuai dengan kelompok sasaran dan berhenti mencari setelah menemukan opsi yang dianggap memadai. Meskipun demikian, model ini berusaha untuk mencapai keputusan yang lebih rasional. Kelemahan model inkremental adalah hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik merupakan masalah „rutin“ dan tidak dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah krisis.

## 2.3. Model Mixed Scanning

Keterbatasan dari model rasional dan incremental membuat Amitai Etzioni mengembangkan model campuran antara model rasional dan incremental untuk menjembatani kelemahan dari kedua model tersebut dengan menggabungkan

elemen-elemen dari keduanya. Membuat Keputusan yang sangat rasional dengan menghitung secara matematis dari setiap alternatif menjadi sesuatu yang tidak efisien dan irrasional, sedangkan incremental yang cenderung mempertahankan status-quo cenderung pula mengabaikan kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Model ini memiliki kelebihan menggabungkan analisis rasional dan incremental, memberikan fleksibilitas dalam perumusan kebijakan, meningkatkan relevansi kebijakan. Kekurangannya prosesnya bisa lebih kompleks dan memakan waktu karena melibatkan dua pendekatan.

#### 2.4. Model Garbage Can

Fokus utama model pendekatan garbage pembuatan keputusan merupakan suatu hal yang berambiguous (bersifat mendua) sangat tinggi dan berawal dari proses yang tidak dapat diperkirakan dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. lalu bagaimana keputusan dibuat dalam anarki terorganisasi. berfokus pada proses pengambilan keputusan, hasil yang dihasilkan, dan siapa yang dapat mengakses interaksi tersebut.

Kelebihan dari model ini adalah memungkinkan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam situasi yang kompleks, Menyadari bahwa keputusan sering muncul secara acak dalam organisasi, Menyarankan strategi untuk mengoptimalkan hasil pengambilan Keputusan, Menekankan pentingnya fleksibilitas, partisipasi, dan tata kelola yang adaptif, Membantu mengidentifikasi kapan dan di mana fenomena anarki organisasi terjadi, Menyediakan alat untuk mengelola proses pengambilan keputusan yang bermasalah

Kelemahan model ini semata mata bersandar pada metode yang sangat acak yang mencerminkan perilaku pembuat kebijakan yang tidak bertanggung jawab.

#### 2.5. Model Institusional

Model perumusan kebijakan yang berpendapat bahwa pemerintah adalah yang membuat kebijakan publik. Model ini juga menjelaskan bahwa tugas formulasi kebijakan merupakan tugas sentral lembaga-lembaga pemerintahan tanpa

perlu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Model ini didasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah di setiap sektor dan tingkat.

Beberapa karakteristik model institusional adalah:

- a. Pemerintah memberikan pengesahan (legitimasi) pada kebijakan
- b. Kebijakan bersifat universal, hanya kebijakan negara yang dapat disebarluaskan
- c. Pemerintah memegang hak monopoli untuk memaksakan kebijakan kepada masyarakat
- d. Kebijakan dipandang sebagai kewajiban legal yang harus dipatuhi semua warga negara

Kelebihan model ini adalah menjelaskan tugas dan pengaturan biro dan departemen, Mempertimbangkan ketentuan konstitusional, hukum administrasi dan umum serta keputusan pengadilan, Berfokus pada organisasi pemerintahan tradisional .

Kekurangan model ini adalah tidak menjelaskan hubungan antara struktur lembaga pemerintah dan isi kebijakan public, Pendekatannya hanya menjelaskan struktur organisasi, tugas, dan fungsi lembaga, tanpa menelaah dampak karakteristik kelembagaan terhadap hasil kebijakan, Tidak ada hubungan yang jelas antara institusi dan kebijakan, sehingga pendekatan ini dianggap tidak penting dan tidak produktif.

## 2.6. Model Elit-Massa

Model elit-massa merupakan salah satu model perumusan kebijakan yang berbeda dengan model pendekatan lainnya, seperti model institusional dan model pendekatan implementasi kebijakan publik: Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat. Maka isu kebijakan yang akan dimasukan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan menjadi hasil konflik dan kesepakatan dari kaum elit politi tersebut sedangkan masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk dapat mencampuri kebijakan yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlunya kebijaksanaan kaum elit politik untuk dapat merumuskan kebijakan yang berlandasan kepentingan umum.

Kelebihan, dari model ini adalah kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli namun kebijakan tersebut tidak ditampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan.

Kekurangan, dari model ini adalah ketidaksetaraan, kurangnya akuntabilitas, dan partisipasi politik yang terbatas.

## 2.7. Model Pendekatan Kelompok

David B Truman Model menyatakan menyatakan bahwa interaksi di antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama saling terikat baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan (interest group). Kebijakan publik merupakan hasil perimbangan (equilibrium) dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan. Pemerintah berperan untuk menengahi konflik dan menjaga keseimbangan dari banyaknya kelompok kepentingan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan berusaha memengaruhi pembuatan atau perubahan kebijakan publik melalui tekanan terhadap pemerintah. Pengaruh suatu kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, kekayaan, kekuatan, kepemimpinan, hubungan dengan pembuat keputusan, dan kohesi internal anggotanya. Perumusan kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok dalam menekan pemerintah melalui tawar-menawar, perjanjian, dan kompromi dengan kelompok kepentingan lain.

Mengakomodasi berbagai kepentingan, memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas, mendorong kolaborasi antar kelompok, meningkatkan legitimasi kebijakan. Kekurangan dalam pendekatan ini yaitu rentan terhadap konflik antar kelompok, ketergantungan pada kekuatan kelompok yang lebih besar, dapat mengabaikan suara minoritas atau kelompok kecil.

## 2.8. Model Sistem-Politik

Model ini didasarkan pada konsep-konsep system yang terdiri inputs, withinputs, outputs, dan feedback dan environment yaitu kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya.



Kelebihan dalam model ini adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural dan membantu dalam memprediksi akibat-akibat yang timbul dari perubahan.

Kekurangan dalam model ini adalah: Banyak kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga partisipasi politik tidak terarah, lalu ada Banyak kendala dari aktor resmi dan tidak resmi dalam merumuskan kebijakan public, Proses perumusan kebijakan hanya dilakukan secara formalitas, sehingga hasil akhirnya merupakan tekanan dari kepentingan segelintir elit.

## **B. Contoh**

### **1. Model Rasional**

Pemerintah suatu provinsi melakukan kebijakan operasi pasar harga gula, disebabkan harganya yang naik cukup tinggi. Operasi pasar ini memberikan alternatif kepada masyarakat untuk membeli gula di pasar yang telah disediakan Pemprov. Kondisi ini sangat membantu masyarakat dan memberi dampak yang sangat signifikan.

### **2. Model Incremental**

Contoh kasus kebijakan publik yang menerapkan model inkremental adalah kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Mengikuti pola ilmu pengetahuan yang selalu berkembang Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan disetiap beberapa tahun sekali selalu mengubah kurikulum pendidikan nasional. Perubahan dunia secara global menuntut materi pendidikan Indonesia yang digodok dalam bentuk kurikulum harus memperbaharui materi pengajarannya. Hal ini dengan tujuan untuk mencapai pengaruh yang maksimal terhadap anak didik secara nasional.

### **3. Model Mixed-Scanning**

Contoh kebijakan berdasar Mixed Scanning adalah Kebijakan Wajib Belajar 12 tahun. Mixed Scanning menggunakan 2 macam pendekatan:

- a. Melihat secara menyeluruh, yaitu seluruh bangsa Indonesia untuk berhak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun sebagai langkah lanjutan wajib belajar 9 tahun.
- b. Mendetailkan pemikiran tahap pertama dan memperdalam analisisnya untuk ditetapkan kebijakan yang lebih parsial untuk mendukung pendekatan pertama.

#### 4. Model Garbage Can

Pada masa orde baru pemerintah membuat kebijakan hak siar berita, jadi pemerintah melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum berita ditayangkan atau dijejalkan ke masyarakat walaupun sebenarnya rakyat membutuhkan berita tersebut tapi apabila pemerintah tidak memberikan izin untuk berita itu dijejalkan ke masyarakat maka berita itu akan tersimpan rapi, atau pecah di perut pemerintah itu sendiri.

#### 5. Model Institusional

Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dinas kehutanan di tingkat daerah. Kebijakan ini dikeluarkan dan dilakukan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

#### 6. Model Elit-Massa

Pemilihan umum di Indonesia merupakan contoh di mana massa berperan aktif dalam menentukan kebijakan publik dengan memilih pemimpin yang dapat menyuarakan suara rakyat dan dapat mendengarkan kepentingan mereka.

#### 7. Model Pendekatan Kelompok

Kebijakan Upah Minimum. Adanya tuntutan dari kelompok pekerja yang meminta upah layak menjadi cikal bakal penetapan kebijakan publik ini. Di mana setelah melakukan negosiasi yang melibatkan banyak kelompok kepentingan termasuk serikat pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya, pemerintah membuat keputusan berdasarkan keseimbangan antara tuntutan-tuntutan tersebut.

## 8. Model Pendekatan Sistem Politik

UU Cipta Kerja. Contoh penerapan model pendekatan sistem politik dalam kebijakan publik di Indonesia bisa dilihat dalam proses pembuatan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), di mana terdapat tuntutan dari dunia usaha dan investasi, yang menginginkan adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia. Mereka menuntut regulasi yang lebih sederhana dan tidak tumpang tindih, yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari proses ini adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi dengan mengubah berbagai undang-undang yang ada dalam omnibus law.

### **C. Daftar Pustaka**

- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22-35.
- Febrianica, D. N., & Pratomo, D. S. (2014). Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(2), 1-13.
- Nugroho, R. (2020). Model-Model Model Perumusan Kebijakan Publik. *Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform]*.
- Puspaningrum, D. (2011). Pelembagaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (phbm) dan dampaknya bagi masyarakat desa hutan. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 5(3), 1-14.
- Rosari, A., Darnis, D., & Patra, L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 314-328.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.